

TESIS

**KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA
TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(Studi kasus Putusan PTUN Bandung Nomor : 06/G/2006/PTUN-
BDG)**

***NON-COMPLIANCE OF STATE ADMINISTRATIVE OFFICIALS
WITH STATE ADMINISTRATIVE COURT DECISIONS WHICH
HAVE PERMANENT LEGAL EFFECT
(Case study of PTUN Bandung Decision Number: 06/G/2006/PTUN-
BDG)***



Oleh:

HARDIYANTO

NIM. 2210622078

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

TESIS

**KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA
TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(Studi kasus Putusan PTUN Bandung Nomor : 06/G/2006/PTUN-
BDG)**

***NON-COMPLIANCE OF STATE ADMINISTRATIVE OFFICIALS
WITH STATE ADMINISTRATIVE COURT DECISIONS WHICH
HAVE PERMANENT LEGAL EFFECT
(Case study of PTUN Bandung Decision Number:
06/G/2006/PTUN-BDG)***



Oleh:

HARDIYANTO

NIM. 2210622078

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

**KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA
TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(Studi kasus Putusan PTUN Bandung Nomor : 06/G/2006/PTUN-BDG)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

**HARDIYANTO
NIM. 2210622078**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA
TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(Studi kasus Putusan PTUN Bandung Nomor : 06/G/2006/PTUN-BDG)**

Disusun dan diajukan oleh:

HARDIYANTO
NIM. 2210622078

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal 17.07.2024

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H.,M.H.
NIDN. 0002056002

Pembimbing 2



Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H.,M.H.
NIDN. 0004087308

TESIS

**KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA
TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(Studi kasus Putusan PTUN Bandung Nomor : 06/G/2006/PTUN-BDG**

Disusun dan diajukan oleh:

HARDIYANTO

NIM. 2210622078

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Pada Tanggal 24 Juli 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H.
NIDN. 0002056002

Pembimbing 2



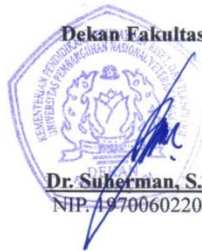
Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H.
NIDN. 0004087308

Koordinator Program Studi
Magister Hukum



**Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.**
NIP. 199304282022031009

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hardiyanto
NIM : 2210622078
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **"KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR : 06/G/2006/PTUN-BDG)"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Hardiyanto
NIM. 2210622078

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardiyanto
NIM : 2210622078
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR : 06/G/2006/PTUN-BDG)”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Hardiyanto
NIM. 2210622078

ABSTRAK

KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR : 06/G/2006/PTUN-BDG)”

HARDIYANTO (2210622078). KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Studi kasus Putusan PTUN Bandung Nomor : 06/G/2006/PTUN-BDG). Dibimbing oleh Taufiqurrahman Syahuri sebagai pembimbing utama dan Ahmad Ahsin Thohari sebagai pembimbing pendamping

Terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia adalah bentuk kehadiran Negara dalam rangka memberi wadah kepada masyarakat dalam mencari keadilan yang mengeluarkan Putusan. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bentuk kepastian hukum bagi parapencari keadilan mengenai Tata Usaha Negara dan dasar Pejabat Tata Usaha Negara untuk menindak lanjutinya. Dalam kenyataannya masi terdapat Pejabat Tata Usaha Negara yang belum melaksanakan tidak patuh terhadap putusan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan konseptual. Penelitian menggunakan data-data yang mengacu pada undang-undang literature dan sumber-sumber tertulis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan Putusan Tata Usaha Negara terdapat beberapa kendala diataranya tidak ada lembaga eksekutor dalam menjalankan Pututan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara lebih mengharapkan niat baik pejabat Tata Usaha Negaara dalam melaksanakannya karena masi terdapat pengaturan yang tidak tegas terhadap pejabat yang tidak melaksankannya. Pembuat undang-undang eksekutif dan legislatif perlu melakukan perubahan di tataran substansi undang-undang maupun peraturan-peraturan tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaan atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Ketidakpatuhan, Tata Usaha Negara, Putusan

ABSTRACT

HARDIYANTO (2210622078). NON-COMPLIANCE OF STATE ADMINISTRATIVE OFFICIALS WITH STATE ADMINISTRATIVE COURT DECISIONS WHICH HAVE PERMANENT LEGAL FORCE (case study of Bandung PTUN Decision Number: 06/G/2006/PTUN-BDG). Supervised by Taufiqurrahman Syahuri as main supervisor and Ahmad Ahsin Thohari as co-supervisor

The establishment of the State Administrative Court in Indonesia is a form of the presence of the State in order to provide a forum for the community to seek justice that issues decisions. Decisions of the State Administrative Court which have permanent legal force are a form of legal certainty for those seeking justice regarding State Administration and the basis for State Administrative Officials to follow up on them. In reality, there are still State Administrative Officials who have not implemented and do not comply with the decision.

This research uses a normative legal method using literature study and a conceptual approach. The research uses data that refers to literature law and written sources

The research results show that there are several obstacles to non-compliance by State Administrative officials in implementing State Administrative Decisions, including the absence of an executing agency in implementing State Administrative Decisions. The implementation of State Administrative Decisions requires the good intentions of State Administrative officials in implementing them because there are still unclear regulations regarding officials who do not implement them. Executive and legislative law makers need to make changes at the substance level of laws and regulations concerning the State Administrative Court and the implementation of State Administrative Court Decisions.

Keywords: *Non-compliance, State Administration, Decision*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatla sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA.Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. Suherman S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada saat menyusun penulisan tesis ini.
3. Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H.M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dosen Pengajar Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Yang tidak bisa penulis sebutkan semua, berkat ilmu yang di berikan selama penulis kuliah sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis
5. Orang tua penulis Ibunda tercinta" Hj Salma" yang telah melahirkan dan membesarkan penulis(dan akhirnya penulis mengerti betapa indahnya hadist yang mengatakan Surga terletak di bawah telapak kaki ibu) almarhum Ayahanda tercinta" H.Apendi (ya Allah tempatkanlah dia di surgamu, ampunilah segala dosa dan kesalahannya , terimalah amal ibadahnya selama hidupnya)

6. Istri tercinta Ella Sulistina, S.H yang sedang mengandung buah hati anak ke tiga kami yang setia selalu menemani penulis dalam susah dan senang, tiada henti memberi dukungan, serta anak-anak kami tercinta dan tersayang, Alvira Syafa Aisyah, Dika Fathir Ibrahim(semoga kelak kalian menjadi anak yang hebat yang melebihi pendidikan ayah dan bunda), terima kasih dan sayang buat kakak dan adik penulis, (Ratniana, S.Ag, M.Pd dan suami Nepi Malyadi, SE), (Rumukti, Am.d, dan Istri Ernawati Sugiono, Am.d), (Yana Martina dan Suami Hendrik), serta (adindah Sutomo, SH dan Istri Mami Chici tak lupa seluruh keponakan, serta, adik ipar penulis yang tidak disebutkan satu persatu, keluarga ini segala-galanya dalam hidup penulis.
7. Bapak Soeparno Darmo Suwito dan Ibu Sulistyowati, bapak dan ibu mertua penulis yang sangat baik, selalumemberi semangat dalam menasehati dan mendukung penulis melanjutkan studi untuk kuliah Magister Hukum
8. Teman-teman seperjuangan Penulis selama kulia di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta terima kasih atas kebaikannya dan mohon maaf jikalau terdapat kesalahan selama proses kuliah
9. Teman-teman penulis di organisasi Permimpunan Mahasiswa Hukum (DPC Tangerang), (HMI Komipam Cabang Ciputat),(Lembaga Kajian Hukum ”Juris Polis) terimah kasih sering berdiskusi dan saling mendukung untuk kemajuan bersama.

Besar harapan penulis karya ilmiah ini dapat berguna dan menjadi bahan bacaan bagi semua orang khususnya peminat Hukum Tata Negara, umumnya masyarakat luas. Sesungguhnya yang benar hanya dari Allah SWT semata dan yang salah dari kelemahan penulis

Jakarta, 24 Juli 2024

Penulis

Hardiyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Kajian Teoritis.....	20
1. Teori Negara Hukum.....	20
2. Teori Contempt of Court.....	25
3. Teori Good Governance.....	29
4. Teori Kepatuhan Hukum.....	32
5. Teori Kepastian Hukum.....	34
B. Kerangka Pikir.....	37
C. Definisi Operasional.....	37
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe dan Jenis Penelitian.....	40

B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Bahan Hukum	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Analisis Bahan Hukum.....	43
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	44
B. Instrumen Hukum Dalam Mengatasi Ketidakatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perspektif Perbandinga	52
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66